

## ANALISIS KONDISI KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN 2023-2024

**Dwi Hasmi Sulistiani<sup>1</sup>**  
[suliss19206@gmail.com](mailto:suliss19206@gmail.com)

<sup>1</sup> Universitas Mataram

**Victoria Kusumaningtyas Priyambodo<sup>2</sup>**  
[priyambodo.victoria@unram.ac.id](mailto:priyambodo.victoria@unram.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Mataram

### ABSTRAK

Analisis kondisi keuangan pemerintah daerah berperan krusial dalam menyediakan gambaran komprehensif kesehatan fiskal, mendeteksi ketidakseimbangan anggaran secara dini, mengoptimalkan alokasi sumber daya, serta meningkatkan akuntabilitas dan keberlanjutan pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi keuangan Pemerintah Kota Batam periode 2023-2024 menggunakan kerangka enam dimensi rasio keuangan, yaitu solvabilitas jangka pendek, solvabilitas anggaran, solvabilitas jangka panjang, solvabilitas layanan, fleksibilitas keuangan, dan kemandirian finansial. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dan menggunakan data sekunder dari laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil menunjukkan kondisi keuangan Pemerintah Kota Batam secara keseluruhan relatif sehat dan stabil, dengan peningkatan signifikan pada likuiditas jangka pendek, fleksibilitas keuangan, dan solvabilitas layanan per penduduk, didukung tidak adanya kewajiban jangka panjang, meskipun solvabilitas anggaran tertekan oleh pertumbuhan belanja pegawai dan kemandirian finansial menurun akibat kontribusi PAD yang melemah. Secara umum, Pemerintah Kota Batam menunjukkan ketahanan fiskal tinggi terhadap guncangan, dengan ruang fiskal luas untuk adaptasi, namun diperlukan optimalisasi PAD, pengendalian belanja wajib, dan pemanfaatan aset guna memperkuat otonomi fiskal dan keberlanjutan pelayanan publik di tengah pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi strategis sebagai kawasan perdagangan bebas.

**Kata Kunci: Fleksibilitas Keuangan, Kemandirian Finansial, Kondisi Keuangan, Solvabilitas Anggaran, Solvabilitas Layanan**

### ABSTRACT

*Analysis of local government financial conditions plays a crucial role in providing a comprehensive overview of fiscal health, enabling early detection of budgetary imbalances, optimizing resource allocation, and enhancing accountability and regional development sustainability. This study aims to analyze the financial condition of the Batam City Government for the 2023-2024 period using a framework of six financial ratio dimensions: short-term solvency, budgetary solvency, long-term solvency, service solvency, financial flexibility, and financial independence. Employing a descriptive quantitative approach, this research utilizes secondary data from local government financial reports. The findings indicate that the overall financial condition of Batam City Government is relatively healthy and stable, with significant improvements in short-term liquidity, financial flexibility, and per capita service solvency, supported by the absence of long-term liabilities—despite pressures on budgetary solvency from rising personnel expenditures and declining financial independence due to weakening locally generated revenue (PAD) contributions. Overall, Batam City Government demonstrates high fiscal resilience against shocks, with substantial fiscal space for adaptation; however, optimizing PAD, controlling mandatory spending, and leveraging assets are essential to strengthen fiscal autonomy and ensure sustainable public service delivery amid population growth and strategic economic activities as a free trade zone.*

**Keywords: Budgetary Solvency, Financial Condition, Financial Flexibility, Financial Independence, Service Solvency**

## **PENDAHULUAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (2003), Keuangan daerah merupakan hak dan kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dijadikan milik daerah dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Oleh karena itu pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara efektif, efisien, dan akuntabel agar pembangunan dapat berjalan dengan optimal (Sarjayadi et al., 2024). Pemerintah daerah dituntut untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja serta memastikan bahwa setiap dana yang dianggarkan dialokasikan secara tepat agar memberikan manfaat yang maksimal dan merata bagi pelayanan publik. Dalam konteks nasional, salah satu fenomena yang umum terjadi yaitu kurangnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam APBD. Idealnya, PAD menjadi sumber pendapatan utama bagi suatu daerah karena berasal dari potensi ekonomi daerah itu sendiri serta dikendalikan langsung oleh pemerintah daerah. Namun pada kenyataannya, banyak pemerintah daerah di Indonesia yang masih bergantung pada pendapatan lain yang bersifat fluktuatif (Setiani & Madila, 2019). Menurut Kanoli et al. (2023), ketergantungan pada dana perimbangan dapat membuat pemerintah daerah secara tidak sadar menjadi kurang inovatif dan kurang menyadari bagaimana situasi keuangannya, percaya dan merasa “aman” bahwa pendanaan akan diselenggarakan secara teratur sehingga pemantauan kondisi keuangan daerah tidak menjadi prioritas.

Akuntansi manajemen pemerintah daerah menekankan sistem akuntabilitas berbasis tolok ukur dan teknik evaluasi keberlanjutan keuangan, yang memungkinkan pemerintah daerah menilai status keberlanjutannya secara sistematis serta menggunakan hasil evaluasi tersebut untuk merampingkan operasional, meningkatkan kinerja, dan menetapkan prioritas penganggaran (Arunachalam et al., 2017). Kondisi keuangan pemerintah daerah dapat dilihat dari kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi daripada belanja, menutupi semua kewajiban di masa kini dan mendatang pengeluaran (Arunachalam et al., 2017). Penilaian kondisi keuangan menjadi hal yang penting karena pemerintah daerah harus mampu untuk menahan guncangan fiskal, mempertahankan kualitas publik, dan terus memantau perubahan kebutuhan masyarakat. Selain itu, hasilnya menjadi dasar pengambilan kebijakan strategis yang meningkatkan kemandirian dan pelayanan publik. Penilaian kondisi keuangan membantu mengidentifikasi ketergantungan pada dana perimbangan, sehingga mendorong optimalisasi PAD dan efisiensi belanja (Hapsari et al., 2025). Di Indonesia, analisis ini krusial karena banyak daerah mengalami penurunan solvabilitas selama COVID-19, memengaruhi kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek dan panjang (Hapsari et al., 2025).

Studi di Kalimantan Barat (2021-2023) membuktikan bahwa penilaian kemandirian fiskal berpengaruh terhadap keberlanjutan, menekankan urgensi analisis berkala (Fariyanda et al., 2025). Di Jawa Tengah, perbedaan signifikan rasio solvabilitas pra- dan pasca-pandemi menunjukkan pentingnya monitoring untuk ketahanan fiskal (Habibi et al., 2021). Penelitian Makmur et al. (2025) menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Batang secara keseluruhan meningkat pada rasio kemandirian keuangan, solvabilitas jangka pendek, dan solvabilitas layanan sebelum, selama, dan sesudah pandemi COVID-19 (2018-2023), meskipun fleksibilitas keuangan fluktuatif dan solvabilitas operasional menurun pasca-pandemi. Penelitian Utami & Martiningsih (2024) menganalisis kondisi keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2017-2021 menggunakan rasio solvabilitas, kemandirian, dan fleksibilitas keuangan dari laporan keuangan daerah. Hasilnya menunjukkan variasi performa antar-daerah, dengan Pemerintah Kota Mataram unggul di kemandirian keuangan, Kabupaten Sumbawa Barat terbaik di fleksibilitas dan solvabilitas layanan, serta Kabupaten Lombok Utara mendominasi solvabilitas anggaran dan operasional.

Kota Batam merupakan kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Wilayah administrasinya mencakup Pulau Batam, Pulau Rempang, Pulau Galang, serta sejumlah pulau kecil lain yang berada di sekitar Selat Singapura dan Selat Malaka. Ketiga pulau utama yaitu Batam, Rempang, dan Galang dihubungkan oleh Jembatan Bareleng. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, jumlah penduduk pada semester pertama tahun 2025 mencapai 1.365.266 jiwa dengan tingkat kepadatan sekitar 1.300 jiwa per km<sup>2</sup>. Batam juga termasuk dalam kawasan ekonomi khusus dan wilayah perdagangan bebas Batam Raya.

Sebagai salah satu kota dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, Kota Batam menghadapi tantangan yang mirip dengan daerah lain, yaitu perlunya meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sambil mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan. Kota Batam merupakan kota industri, perdagangan, dan pariwisata yang strategis secara nasional diakibatkan oleh posisi geografis yang dekat dengan Singapura dan Malaysia membuat Kota Batam memiliki potensi PAD yang cukup tinggi melalui beberapa sektor seperti pajak daerah, perizinan, dan jasa usaha. Akan tetapi, pemerintah Kota Batam tetap perlu memastikan keseimbangan fiskal agar dapat memenuhi kewajiban dan menyediakan pelayanan publik yang merata dan berkelanjutan.

Penelitian ini mengacu pada kerangka penilaian kondisi keuangan pemerintah daerah yang dikembangkan oleh Ritonga (2014), yang mencakup enam dimensi meliputi solvabilitas jangka pendek, solvabilitas anggaran, solvabilitas jangka panjang, fleksibilitas keuangan, kemandirian finansial, dan solvabilitas layanan. Analisis keuangan ini menjadi hal yang penting bagi Kota Batam sebagai kota industri dan tempat perdagangan internasional, karena kondisi keuangan daerah menjadi sangat dipengaruhi oleh stabilitas investasi, kegiatan ekspor-impor, sektor pariwisata, serta kebijakan pemerintah pusat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menilai kondisi keuangan Pemerintah Kota Batam pada tahun 2023-2024 secara menyeluruh, mencakup aspek solvabilitas, kemandirian finansial, dan fleksibilitas keuangan. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kesehatan fiskal Kota Batam dan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam membuat kebijakan keuangan yang lebih mandiri, adaptif, dan berkelanjutan, sehingga dapat mendukung pembangunan efektif dan berorientasi pada pelayanan publik.

## **TINJAUAN LITERATUR**

### **Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah**

Kondisi keuangan pemerintah daerah didefinisikan sebagai kemampuan keuangan suatu pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya, mengantisipasi kejadian tak terduga, serta mengeksekusi hak keuangannya secara efektif dan efisien (Rivenbark et al., 2010). Dalam literatur akuntansi publik, konsep ini juga disebut sebagai *fiscal health*, yaitu kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban keuangan dan layanan masyarakat secara berkelanjutan (Leiser & Mills, 2019). Pendekatan ini bertujuan menilai kesehatan fiskal daerah guna mendukung pengambilan keputusan strategis, berbeda dari *fiscal distress* yang menggambarkan ketidakmampuan mempertahankan standar operasi dan layanan jangka panjang (Gorina et al., 2018).

Penilaian kondisi keuangan pemerintah daerah pada satu negara belum tentu dapat diterapkan dalam konteks negara lainnya karena setiap negara memiliki struktur keuangan daerah yang berbeda. Dalam penelitiannya, Iacuzzi (2021) menyimpulkan bahwa literatur tentang indikator keuangan pemerintah daerah telah meningkat, terutama untuk menilai kesehatan keuangan, tetapi tidak ada konsensus pada set indikator umum, meskipun pengukuran likuiditas dan solvabilitas paling populer. Indikator ini digunakan untuk

transparansi, *benchmarking*, pemantauan kinerja, dan mengatasi krisis, dengan ketergantungan pada laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi, meski tantangan seperti definisi ambigu dan keterbatasan akuntansi publik tetap ada.

Ritonga (2014) mengembangkan konsep penilaian kondisi keuangan pemerintah daerah di Indonesia melalui enam dimensi yaitu solvabilitas jangka pendek, jangka panjang, solvabilitas anggaran, solvabilitas layanan, fleksibilitas keuangan, dan kemandirian keuangan.

### 1. Solvabilitas Jangka Pendek

Solvabilitas jangka pendek adalah kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban finansial yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu satu tahun (Ritonga, 2016). Rasio ini mencerminkan tingkat likuiditas pemerintah daerah, yaitu sejauh mana aset lancar yang dimiliki mampu menutup kewajiban lancar tanpa mengganggu kelangsungan pelayanan publik. Semakin tinggi rasio solvabilitas jangka pendek, semakin kuat kemampuan daerah dalam membayar utang jangka pendeknya. Rasio likuiditas yang rendah dapat mengakibatkan masalah arus kas yang akan membutuhkan penggunaan pinjaman jangka pendek yang lebih besar untuk menutupi pengeluaran (Arunachalam et al., 2017).

Dalam kerangka analisis Ritonga (2012), solvabilitas jangka pendek diukur dengan beberapa rasio yang mencerminkan tingkat likuiditas yang berbeda-beda. Rasio yang hanya menggunakan kas dan investasi jangka pendek menunjukkan kemampuan pembayaran paling likuid, sedangkan rasio yang melibatkan piutang dan aset lancar memberikan gambaran likuiditas yang lebih luas. Ketiga rasio tersebut digunakan secara bersama-sama untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

### 2. Solvabilitas Anggaran

Solvabilitas anggaran mencerminkan kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membiayai pengeluaran operasionalnya selama satu periode anggaran (Ritonga et al., 2012). Rasio ini menunjukkan apakah pendapatan dalam tahun berjalan yang diperoleh pemerintah daerah mampu menutup belanja operasional tanpa mengandalkan sumber pembiayaan lain (Bisogno et al., 2019). Dalam pengukuran solvabilitas anggaran, fokus analisis diarahkan pada pendapatan yang bersifat umum dan dapat digunakan secara fleksibel untuk membiayai berbagai kebutuhan operasional. Oleh karena itu, pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dikeluarkan dari perhitungan karena penggunaannya telah ditentukan secara spesifik oleh pemerintah pusat dan tidak dapat digunakan secara bebas untuk membiayai seluruh belanja operasional daerah.

### 3. Solvabilitas Jangka Panjang

Solvabilitas jangka panjang menilai kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya, seperti utang dan komitmen fiskal yang harus dibayar di masa depan. Rasio ini mencerminkan keberlanjutan fiskal pemerintah daerah, sejauh mana struktur keuangan daerah terutama aset pemerintah mampu memenuhi kewajiban jangka panjang tanpa menimbulkan tekanan fiskal yang berlebihan. Dalam mengukur solvabilitas jangka panjang, kewajiban jangka panjang dibandingkan dengan aset dan ekuitas yang dimiliki pemerintah daerah. Rasio-rasio ini memberikan gambaran mengenai kebutuhan struktur permodalan pemerintah daerah dan tingkat risiko fiskal dalam jangka panjang.

4. Fleksibilitas Keuangan

Fleksibilitas keuangan menggambarkan kemampuan pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan keuangan dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi, tekanan fiskal, atau kebutuhan pembiayaan. Rasio ini menunjukkan ruang fiskal yang dimiliki pemerintah daerah setelah memenuhi kewajiban belanja yang bersifat wajib, khususnya belanja pegawai. Menurut Ritonga (2012), pemerintah daerah yang memiliki fleksibilitas keuangan yang baik mampu mengalokasikan kembali sumber daya keuangannya tanpa mengganggu stabilitas fiskal. Pengukuran ini difokuskan pada sisa pendapatan yang tersedia setelah dikurangi pendapatan terikat dan belanja wajib.

5. Kemandirian Finansial

Kemandirian finansial menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan dengan mengandalkan sumber pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri. Rasio ini menggambarkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada transfer dari pemerintah provinsi atau pusat.

Pengukuran kemandirian finansial dalam kerangka analisis Ritonga (2014b) diukur melalui kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total pendapatan dan total belanja daerah. Semakin tinggi rasio maka semakin besar kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi fiskalnya.

6. Solvabilitas Layanan

Solvabilitas layanan menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan dan mempertahankan tingkat pelayan publik kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan penduduk (Ritonga, 2014a). Rasio ini mengaitkan antara kapasitas keuangan daerah dengan jumlah penduduk, sehingga dapat menunjukkan tingkat ketersediaan sumber daya fiskal per kapita. Dalam kerangka analisis ini, solvabilitas layanan diukur dengan membandingkan total aset, ekuitas, dan belanja daerah terhadap jumlah penduduk. Pendekatan ini memberikan gambaran mengenai kapasitas keuangan pemerintah daerah dalam mendukung penyediaan pelayanan publik secara berkelanjutan.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2023 dan 2024. Analisis data dilakukan dengan menghitung rasio-rasio keuangan yang dikembangkan oleh Ritonga (2014) dan menginterpretasikannya untuk memberikan gambaran kinerja keuangan daerah. Analisis rasio keuangan terdiri dari enam dimensi yaitu solvabilitas jangka pendek, solvabilitas anggaran, solvabilitas jangka panjang, solvabilitas layanan, fleksibilitas keuangan, dan kemandirian keuangan. Masing-masing dimensi diukur dengan beberapa rasio yang dijabarkan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Dimensi dan Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah**

Dimensi	Analisis Rasio
Solvabilitas Jangka Pendek	Rasio A = $\frac{\text{Kas dan Setara Kas} + \text{Investasi Jangka Pendek}}{\text{Kewajiban Lancar}}$
	Rasio B = $\frac{\text{Kas dan Setara Kas} + \text{Investasi Jangka Pendek} + \text{Piutang}}{\text{Kewajiban Lancar}}$

	Rasio C	$= \frac{\text{Aser Lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}}$
Solvabilitas Anggaran	Rasio A	$= \frac{\text{Total Pendapatan} - \text{Pendapatan DAK}}{\text{Total Belanja} - \text{Belanja Modal}}$
	Rasio B	$= \frac{\text{Total Pendapatan} - \text{Pendapatan DAK}}{\text{Belanja Operasional}}$
	Rasio C	$= \frac{\text{Total Pendapatan} - \text{Pendapatan DAK}}{\text{Belanja Pegawai}}$
	Rasio D	$= \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Total Belanja}}$
Solvabilitas Jangka Panjang	Rasio A	$= \frac{\text{Kewajiban Jangka Panjang}}{\text{Total Aset}}$
	Rasio B	$= \frac{\text{Kewajiban Jangka Panjang}}{\text{Ekuitas Investasi}}$
	Rasio C	$= \frac{\text{Ekuitas Investasi}}{\text{Total Aset}}$
Solvabilitas Layanan	Rasio A	$= \frac{\text{Total Ekuitas}}{\text{Populasi}}$
	Rasio B	$= \frac{\text{Total Aset}}{\text{Populasi}}$
	Rasio C	$= \frac{\text{Total Belanja}}{\text{Populasi}}$
Fleksibilitas Keuangan	Rasio A	$= \frac{\text{Total Pendapatan} - \text{Pendapatan DAK} - \text{Belanja Pegawai}}{\text{Pengeluaran Pembiayaan} - \text{Belanja Bunga}}$
	Rasio B	$= \frac{\text{Total Pendapatan} - \text{Pendapatan DAK} - \text{Belanja Pegawai}}{\text{Total Kewajiban}}$
	Rasio C	$= \frac{\text{Total Pendapatan} - \text{Pendapatan DAK} - \text{Belanja Pegawai}}{\text{Kewajiban Jangka Panjang}}$
	Rasio D	$= \frac{\text{Total Pendapatan} - \text{Pendapatan DAK}}{\text{Total Kewajiban}}$
Kemandirian Finansial	Rasio A	$= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}}$
	Rasio B	$= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Belanja}}$

---

Sumber: Ritonga (2014)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Solvabilitas Jangka Pendek**

Berdasarkan tabel komponen solvabilitas jangka pendek pada tahun 2023-2024, posisi likuiditas perusahaan menunjukkan peningkatan yang signifikan. Peningkatan nilai rasio solvabilitas jangka pendek pada tahun 2024 disebabkan oleh menurunnya kewajiban lancar dan meningkatnya nilai aset lancar termasuk kas dan piutang yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Batam. Kondisi ini menunjukkan bahwa aset lancar perusahaan jauh lebih besar dibandingkan dengan kewajiban jangka pendeknya, sehingga risiko gagal bayar jangka pendek relatif rendah.

**Tabel 2. Komponen Solvabilitas Jangka Pendek**

<b>Komponen</b>	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2024</b>
Kas dan Setara kas	Rp 115.926.036.889,82	Rp 134.702.731.312,97
Investasi Jangka Pendek	Rp -	Rp -
Piutang	Rp 300.511.319.919,49	Rp 387.427.579.852,10
Aset Lancar	Rp 471.724.029.041,02	Rp 605.902.058.033,98
Kewajiban Lancar	Rp 123.417.416.032,06	Rp 23.810.854.385,22

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Batam (2024)

Rasio A mencerminkan kas dan setara kas serta investasi jangka pendek terhadap kewajiban lancar, meningkat dari 0,94 menjadi 5,66, ini menunjukkan bahwa kas dan setara kas yang tersedia cukup berlimpah untuk menutupi kewajiban jangka pendek, sehingga likuiditas langsung Pemerintah Kota Batam jauh lebih bagus dibandingkan tahun sebelumnya. Rasio B, mengalami peningkatan yang signifikan dari 3,37 menjadi 21,93 menandakan bahwa kas dan setara kas serta piutang, peningkatan tersebut menegaskan bahwa kas dan piutang lebih dari cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Sementara itu, Rasio C merupakan perbandingan seluruh aset lancar dan kewajiban lancar yang meningkat dari 2,82 menjadi 25,45, mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek berada ditingkat yang sangat aman, dengan aset lancar yang jumlahnya jauh melampaui kewajiban jangka pendek.

**Tabel 3. Rasio Solvabilitas Jangka Pendek**

<b>Rasio Solvabilitas Jangka Pendek</b>	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2024</b>
Rasio A	0,94	5,66
Rasio B	3,37	21,93
Rasio C	2,82	25,45

Sumber: Data Diolah

Peningkatan ketiga rasio tersebut menandakan likuiditas Pemerintah Kota Batam yang sehat. Namun, peningkatan rasio yang terlalu besar juga mencerminkan adanya dana yang menganggur, sehingga pemanfaatannya perlu dioptimalkan untuk pelayanan publik dan pembangunan daerah, Selama tahun 2023-2024 Pemerintah Kota Batam tidak memiliki investasi jangka pendek yang signifikan, sehingga kas, setara kas dan piutang menjadi sumber utama dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang aman.

### **Solvabilitas Anggaran**

Berdasarkan data komponen solvabilitas anggaran tahun 2023-2024, Pemerintah Kota Batam menunjukkan perkembangan pendapatan dan belanja daerah yang meningkat secara bersamaan. Total pendapatan mengalami kenaikan pada tahun 2024, diikuti dengan peningkatan total belanja daerah, baik pada belanja operasional, belanja modal, maupun belanja pegawai. Kondisi ini mencerminkan meningkatnya aktivitas pemerintahan yang membutuhkan dukungan pembiayaan yang lebih besar.

**Tabel 4. Komponen Solvabilitas Anggaran**

Komponen	Tahun 2023	Tahun 2024
Total Pendapatan	Rp 3.103.208.245.106,79	Rp 3.645.287.633.271,19
Pendapatan DAK	Rp 370.361.116.948,00	Rp 407.805.669.072,00
Total Belanja	Rp 3.042.352.524.490,24	Rp 3.626.510.938.848,04
Belanja Modal	Rp 529.255.447.014,00	Rp 656.058.048.777,14
Belanja Operasional	Rp 2.511.348.234.926,24	Rp 2.970.452.890.070,90
Belanja Pegawai	Rp 1.211.060.746.004,60	Rp 1.507.622.963.359,40

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Batam (2024)

Berdasarkan penghitungan rasio solvabilitas anggaran, Rasio A mengalami kenaikan dari 1,0874 pada tahun 2023 menjadi 1,0899 yang mengindikasikan bahwa pendapatan daerah yang tidak bersifat terikat masih cukup untuk membiayai belanja operasional di luar belanja modal, meskipun terjadi peningkatan pengeluaran. Rasio B juga menunjukkan kenaikan dari 1,0882 menjadi 1,0899 yang mencerminkan bahwa pendapatan di luar pendapatan DAK masih cukup untuk membiayai belanja operasional secara keseluruhan. Sementara itu, Rasio C mengalami penurunan dari 2,2566 pada tahun 2023 menjadi 2,1474 pada tahun 2024, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja pegawai relatif lebih cepat dibandingkan pendapatan daerah yang bersifat fleksibel, sehingga perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan anggaran. Di sisi lain, Rasio D menurun dari 1,0200 menjadi 1,0052, menandakan bahwa selisih antara total pendapatan dan total belanja semakin mengecil, sehingga ruang fiskal lebih terbatas dibandingkan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, meskipun solvabilitas anggaran Pemerintah Kota Batam masih berada pada kondisi yang relatif stabil, pengendalian pertumbuhan belanja, khususnya belanja pegawai, tetap diperlukan untuk menjaga keberlanjutan fiskal di masa mendatang.

**Tabel 5. Rasio Solvabilitas Anggaran**

Rasio Solvabilitas Anggaran	Tahun 2023	Tahun 2024
Rasio A	1,0874	1,0899
Rasio B	1,0882	1,0889
Rasio C	2,2566	2,1474
Rasio D	1,0200	1,0052

Sumber: Data Diolah

### Solvabilitas Jangka Panjang

Berdasarkan tabel 5, Pemerintah Kota Batam tidak memiliki kewajiban jangka panjang maupun ekuitas investasi yang tercatat selama periode pengamatan. Sementara itu, total aset pemerintah daerah mengalami peningkatan pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan struktur keuangan Pemerintah Kota Batam tidak dibebani oleh kewajiban jangka panjang, sehingga risiko fiskal dalam jangka panjang relatif rendah dan posisi keuangan daerah cenderung aman dari tekanan pembayaran utang jangka panjang.

**Tabel 6. Komponen Solvabilitas Jangka Panjang**

Komponen	Tahun 2023	Tahun 2024
Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -
Ekuitas Investasi	Rp -	Rp -
Total Aset	Rp 12.602.608.179.532,50	Rp 12.997.707.268.846,70

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Batam (2024)

Rasio A yang membandingkan antara kewajiban jangka panjang dengan total aset menunjukkan nilai 0,00 pada tahun 2023 dan 2024, hal ini menunjukkan bahwa aset yang

dimiliki Pemerintah Kota Batam tidak dibebani oleh utang jangka panjang. Rasio B tidak terdefinisi karena saldo ekuitas investasi tidak ada sehingga tidak ada pembandingan, yang mengindikasikan bahwa pemerintah daerah tidak memanfaatkan skema pembiayaan jangka panjang berbasis ekuitas investasi. Selanjutnya, Rasio C membandingkan antara ekuitas investasi terhadap total aset juga bernilai 0,00 pada kedua periode penelitian, yang menunjukkan bahwa peningkatan total aset tidak berasal dari pembentukan ekuitas investasi. Secara keseluruhan, hasil rasio solvabilitas jangka panjang ini menggambarkan bahwa kondisi keuangan Pemerintah Kota Batam dalam jangka panjang berada pada posisi yang aman, meskipun keterbatasan komponen keuangan menyebabkan variasi rasio dan analisis struktur pembiayaan jangka panjang menjadi sedikit terbatas.

**Tabel 7. Rasio Solvabilitas Jangka Panjang**

Rasio Solvabilitas Jangka Panjang	Tahun 2023	Tahun 2024
Rasio A	0	0
Rasio B	-	-
Rasio C	0	0

Sumber: Data Diolah

### Solvabilitas Layanan

Berdasarkan tabel komponen solvabilitas layanan tahun 2023 -2024, total ekuitas dan aset Pemerintah Kota Batam mengalami peningkatan pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu, total belanja daerah juga meningkat yang menunjukkan bertambahnya kebutuhan pembiayaan pelayanan publik. Selama periode tersebut, jumlah penduduk Kota Batam juga mengalami pertumbuhan, berdasarkan data BPS Kota Batam dalam publikasi “Kota Batam Dalam Angka 2024” penduduk Kota Batam bertumbuh dari 1.256.610 jiwa pada tahun 2023 menjadi 1.276.930 jiwa pada tahun 2024. Peningkatan jumlah penduduk ini mendorong meningkatnya kebutuhan terhadap penyediaan layanan publik oleh pemerintah.

**Tabel 8. Komponen Solvabilitas Layanan**

Komponen	Tahun 2023	Tahun 2024
Total Ekuitas	Rp 12.479.190.763.500,40	Rp 12.973.896.414.461,50
Total Aset	Rp 12.602.608.179.532,50	Rp 12.997.707.268.846,70
Total Belanja	Rp 3.042.352.524.490,24	Rp 3.626.510.938.848,04
Populasi	Rp -	Rp -

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Batam (2024)

Berdasarkan penghitungan rasio untuk dimensi solvabilitas layanan, seluruh rasio solvabilitas layanan Pemerintah Kota Batam mengalami peningkatan. Rasio A meningkat dari 9.930.838,34 menjadi 10.160.225,24 yang menggambarkan bahwa dukungan ekuitas daerah terhadap jumlah penduduk mengalami perbaikan. Peningkatan ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menopang pelayanan publik dari sumber daya ekuitas yang dimiliki. Rasio B juga mengalami peningkatan dari 10.029.052,91 menjadi 10.178.872,19 yang mencerminkan bertambahnya kapasitas aset daerah per penduduk yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang penyediaan layanan publik. Sementara itu, Rasio C meningkat dari 2.421.079,35 menjadi 2.840.023,29, hal ini menandakan adanya peningkatan belanja daerah per penduduk sebagai bentuk respons terhadap kebutuhan pelayanan masyarakat. Dengan demikian, secara keseluruhan kenaikan ketiga rasio tersebut menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kota Batam dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik mengalami perbaikan pada tahun 2024.

**Tabel 9. Rasio Solvabilitas Layanan**

<b>Rasio Solvabilitas Layanan</b>	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2024</b>
Rasio A	9.930.838,34	10.160.225,24
Rasio B	10.029.052,91	10.178.872,19
Rasio C	2.421.079,35	2.840.023,29

Sumber: Data Diolah

### **Fleksibilitas Keuangan**

Berdasarkan tabel komponen fleksibilitas keuangan tahun 2023-2024, terlihat bahwa total pendapatan Pemerintah Kota Batam mengalami peningkatan pada tahun 2024 seiring dengan kenaikan belanja pegawai. Di sisi lain, pemerintah tidak memiliki pengeluaran pembiayaan, belanja bunga, maupun kewajiban jangka panjang selama periode pengamatan. Selain itu, total kewajiban pemerintah daerah mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa setelah memenuhi belanja pegawai yang bersifat wajib, khususnya belanja pegawai, pemerintah daerah masih memiliki ruang fiskal yang relatif luas untuk menyesuaikan kebijakan keuangannya.

**Tabel 10. Komponen Fleksibilitas Keuangan**

<b>Komponen</b>	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2024</b>
Total Pendapatan	Rp 3.103.208.245.106,79	Rp 3.645.287.633.271,19
Pendapatan DAK	Rp 370.361.116.948,00	Rp 407.805.669.072,00
Belanja Pegawai	Rp 1.211.060.746.004,60	Rp 1.507.622.963.359,40
Pengeluaran Pembiayaan	Rp -	Rp -
Belanja Bunga	Rp -	Rp -
Total Kewajiban	Rp 123.417.416.032,06	Rp 23.810.854.385,22
Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Batam (2024)

Berdasarkan hasil perhitungan rasio, Rasio A dan Rasio C dimensi fleksibilitas keuangan pada tahun 2023 dan 2024 tidak dapat dihitung atau nilai tidak terdefinisi karena tidak terdapat pengeluaran pembiayaan, belanja bunga, maupun kewajiban jangka panjang sebagai pembagi. Kondisi ini mencerminkan bahwa Pemerintah Kota Batam tidak memiliki tekanan pembiayaan jangka panjang maupun beban bunga yang harus ditanggung selama periode pengamatan. Selanjutnya, Rasio B yang membandingkan total pendapatan setelah dikurangi pendapatan DAK dan belanja pegawai terhadap total kewajiban mengalami peningkatan yang signifikan dari 12,33 pada tahun 2023 menjadi 72,56 pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajibannya karena masih memiliki sisa pendapatan yang cukup setelah membiayai belanja pegawai. Sementara itu Rasio D, yang membandingkan pendapatan di luar DAK terhadap total kewajiban juga meningkat tajam dari 22,14 menjadi 135,97, hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan fiskal Pemerintah Kota Batam dalam menghadapi kewajiban serta menyesuaikan kebijakan keuangan menjadi jauh lebih baik pada tahun 2024. Dengan demikian, hasil rasio fleksibilitas keuangan menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Batam memiliki tingkat fleksibilitas keuangan yang sangat baik, terutama karena rendahnya kewajiban dan tidak adanya beban pembiayaan jangka panjang, namun dibalik itu peningkatan belanja pegawai tetap perlu dikelola secara teliti agar kondisi keuangan daerah tetap sehat.

**Tabel 11. Rasio Fleksibilitas Keuangan**

<b>Rasio Fleksibilitas Keuangan</b>	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2024</b>
Rasio A	-	-
Rasio B	12,33	72,56

Rasio C	-	-
Rasio D	22,14	135,97

Sumber: Data Diolah

### Kemandirian Finansial

Berdasarkan tabel komponen kemandirian finansial tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Batam mengalami peningkatan pada tahun 2024. Peningkatan PAD tersebut terjadi seiring dengan naiknya total pendapatan. Namun, peningkatan pendapatan ini diikuti dengan peningkatan total belanja daerah yang cukup signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan dari sumber sendiri meningkat, kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan juga terus bertambah.

**Tabel 12. Komponen Kemandirian Finansial**

Komponen	Tahun 2023	Tahun 2024
Pendapatan Asli Daerah	Rp 1.529.020.059.422,79	Rp 1.768.618.582.165,19
Total Pendapatan	Rp 3.103.208.245.106,79	Rp 3.645.287.633.271,19
Total Belanja	Rp 3.042.352.524.490,24	Rp 3.626.510.938.848,04

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Batam (2024)

Berdasarkan penghitungan rasio untuk komponen kemandirian finansial, Rasio A yang membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan menurun dari 0,4927 pada tahun 2023 menjadi 0,4852 pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah sedikit berkurang, sehingga tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pendapatan transfer relatif meningkat. Selanjutnya, Rasio B mengalami penurunan dari 0,5026 menjadi 0,4877. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan PAD dalam membiayai keseluruhan belanja daerah mengalami penurunan pada tahun 2024. Secara keseluruhan, hasil rasio kemandirian finansial menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Batam masih memiliki tingkat kemandirian fiskal yang cukup baik, namun peningkatan PAD perlu diupayakan agar ketergantungan terhadap sumber pendapatan eksternal dapat dikurangi dan otonomi fiskal daerah dapat diperkuat.

**Tabel 13. Rasio Kemandirian Finansial**

Rasio Kemandirian Finansial	Tahun 2023	Tahun 2024
Rasio A	0,4927	0,4852
Rasio B	0,5026	0,4877

Sumber: Data Diolah

### Analisis dan Diskusi

Analisis kondisi keuangan Pemerintah Kota Batam periode 2023-2024 menunjukkan performa yang secara keseluruhan sehat dan membaik di sebagian besar dimensi kerangka Ritonga (2014). Solvabilitas jangka pendek meningkat drastis (Rasio A dari 0,94 menjadi 5,66; Rasio C dari 2,82 menjadi 25,45), didorong oleh penurunan kewajiban lancar dan kenaikan aset lancar seperti kas dan piutang. Hal ini menandakan likuiditas kuat dan risiko gagal bayar rendah. Solvabilitas jangka panjang dan fleksibilitas keuangan juga berada pada tingkat aman, dengan tidak adanya kewajiban jangka panjang serta ruang fiskal yang luas, serupa dengan temuan Makmur et al. (2025) di Kabupaten Batang yang menunjukkan ketahanan daerah pasca-pandemi.

Solvabilitas layanan dan anggaran mencerminkan kemampuan daerah dalam mendukung pelayanan publik yang berkelanjutan, dengan peningkatan rasio per kapita (Rasio A layanan dari Rp9,93 juta menjadi Rp10,16 juta per jiwa) seiring pertumbuhan populasi dan belanja. Namun, solvabilitas anggaran menunjukkan tanda lemah seperti penurunan rasio C (dari 2,26 menjadi 2,15) akibat belanja pegawai yang tumbuh lebih cepat daripada pendapatan fleksibel, serta rasio D mendekati 1,00 yang mengindikasikan ruang fiskal menyempit (Bisogno et al., 2019; Ritonga, 2012).

Kemandirian finansial menjadi titik lemah utama, dengan kontribusi PAD yang sedikit menurun (Rasio A dari 0,4927 menjadi 0,4852), meskipun nilai absolut PAD naik, yang menunjukkan ketergantungan transfer masih dominan. Fenomena ini umum terjadi di daerah industri seperti Batam (Kanoli et al., 2023; Setiani & Madila, 2019). Hal ini sejalan dengan studi Utami & Martiningsih (2024) di NTB, yang mana Mataram unggul tapi daerah lain variatif, yang kemudian menekankan urgensi optimalisasi PAD melalui pajak dan perizinan di kawasan ekonomi khusus.

Secara keseluruhan, kesehatan fiskal Kota Batam mendukung otonomi daerah tetapi memerlukan strategi pengendalian belanja wajib dan diversifikasi PAD untuk ketahanan jangka panjang, sebagaimana direkomendasikan oleh (Hapsari et al., 2025) pasca-COVID-19. Misalnya, melalui intensifikasi pemungutan pajak daerah via digitalisasi seperti *tapping box* di sektor hotel, restoran, dan perizinan industri, sebagaimana diterapkan Batam pada tahun 2025. Strategi lain untuk mengendalikan belanja pegawai melalui penataan pegawai, peningkatan PAD untuk kompensasi dan realokasi ke belanja modal. Diversifikasi PAD dapat dilakukan melalui pemanfaatan aset daerah via kerja sama dengan swasta serta pengembangan di sektor pariwisata lokal (Cahyani et al., 2025). Implementasi ini akan memperkuat fleksibilitas fiskal, mengurangi ketergantungan transfer dan meningkatkan pelayanan publik (Maggara et al., 2024; Palis, 2025).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis kondisi keuangan Pemerintah Kota Batam tahun 2023–2024 dengan menggunakan enam dimensi, dapat disimpulkan bahwa secara umum kondisi keuangan Pemerintah Kota Batam berada dalam keadaan relatif sehat dan stabil. Pemerintah daerah menunjukkan kemampuan yang baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, yang tercermin dari meningkatnya rasio likuiditas dan rendahnya risiko gagal bayar.

Pada aspek solvabilitas anggaran, pendapatan daerah masih mampu menutup belanja operasional, meskipun pertumbuhan belanja, khususnya belanja pegawai, mulai menekan ruang fiskal. Dari sisi solvabilitas jangka panjang, tidak adanya kewajiban jangka panjang menunjukkan struktur keuangan daerah yang aman dan risiko fiskal yang rendah. Selain itu, fleksibilitas keuangan berada pada tingkat yang sangat baik, didukung oleh rendahnya kewajiban dan tidak adanya beban pembiayaan jangka panjang.

Namun demikian, tingkat kemandirian finansial masih perlu ditingkatkan karena kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan dan belanja cenderung menurun. Sementara itu, pada aspek solvabilitas layanan, peningkatan seluruh rasio menunjukkan adanya perbaikan kapasitas keuangan daerah dalam mendukung penyediaan pelayanan publik per penduduk. Secara keseluruhan, Pemerintah Kota Batam memiliki kondisi keuangan yang cukup kuat, namun tetap perlu meningkatkan pengendalian belanja dan memperkuat kemandirian fiskal agar keberlanjutan keuangan daerah dapat terjaga.

## **REFERENSI**

- Arunachalam, M., Chen, C., & Davey, H. (2017). A Model For Measuring Financial Sustainability Of Local Authorities: Model Development and Application. *Asia-Pacific Management Accounting Journal*, 12(1).
- Bisogno, M., Cuadrado-Ballesteros, B., Santis, S., & Citro, F. (2019). Budgetary solvency of Italian local governments: an assessment. *International Journal of Public Sector Management*, 32(2), 122–141. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-11-2017-0328>
- Cahyani, N. L. V. A., Shahirah, N. S., Raja, I. S. L., & Pangestoeti, W. (2025). Tantangan dan Peluang dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah: Studi di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jiem.v3i6.5419>

- Fariyanda, R., Umyana, A., & Muhsin, M. (2025). Mengukur Kemandirian Fiskal Daerah: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil Dalam Era Desentralisasi di Provinsi Kalimantan Barat. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 11(5), 4743–4754. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i5.4320>
- Gorina, E., Maher, C., & Joffe, M. (2018). Local Fiscal Distress: Measurement and Prediction. *Public Budgeting and Finance*, 38(1), 72–94. <https://doi.org/10.1111/pbaf.12165>
- Habibi, K. A., Intikhanah, S., & Hidayah, R. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Se-Provinsi Jawa Tengah Sebelum dan Saat Pandemi COVID-19. *Neraca*, 17(1), 122–147. <https://doi.org/10.48144/neraca.v17i1.598>
- Hapsari, M. T., Zamzama, D. A., Sujiatmiko, D. P., Umroh, R. U. Z., & Kusumadewi, R. T. (2025). Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(2), 154–164. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i2.175>
- Iacuzzi, S. (2021). An appraisal of financial indicators for local government: a structured literature review. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 34(6), 69–94. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-04-2021-0064>
- Kanoli, A. D. S., Syamsul, & Zuhroh, S. (2023). Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2019-2021. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 6(8). <https://doi.org/https://doi.org/10.56338/jks.v6i8.3993>
- Leiser, S., & Mills, S. (2019). Local Government Fiscal Health: Comparing Self-Assessments to Conventional Measures. *Public Budgeting & Finance*, 39.
- Maggara, T. S., Putri, B. K., Frinaldi, A., Asnil, & Putri, N. E. (2024). Analisis Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Dana Transfer Pusat dan Dampaknya pada Kemandirian Fiskal. *Jurnal Manajemen Dinamis*, 6(4). <https://journalversa.com/s/index.php/jmd>
- Makmur, I., Usamah, U., & Hidayah, R. (2025). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Sebelum, Selama dan Sesudah Pandemi COVID-19. *Neraca*, 21(2), 178–198. <https://doi.org/10.48144/neraca.v21i2.1898>
- Palis, K. (2025). Transformasi Digital dan Reformasi Tata Kelola Perpajakan Daerah: Studi Kasus Optimalisasi PAD di Indonesia. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 5(1), 163–190. <https://doi.org/10.53625/juremi.v5i1.10508>
- Ritonga, I. T. (2012). Methods of Assessing Local Government Financial Condition: A Critical Review. *Asia Pasific Journal of Accounting and Finance*, 2(2).
- Ritonga, I. T. (2014a). Analysing Service-Level Solvency of Local Governments from Accounting Perspective: A Study of Local Governments in the Province of Yogyakarta Special Territory, Indonesia. *International Journal of Governmental Financial Management*, 14(2).
- Ritonga, I. T. (2014b). Developing A Measure of Local Governments Financial Condition. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 29(2), 142–164.

- Ritonga, I. T. (2016). Clustering local government for optimizing local government financial condition analysis: A case study in Indonesia. *International Journal of Applied Business and Economic Research*, 14(13), 9531–9547.
- Ritonga, I. T., Clark, C., & Wickremasinghe, G. (2012). Assessing Financial Condition of Local Government in Indonesia: An Exploration. *Public and Municipal Finance*, 1(2). <https://orcid.org/0000-0001-6946-0660>
- Rivenbark, W. C., Roenigk, D. J., & Allison, G. S. (2010). Conceptualizing Financial Condition In Local Government. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 22(2), 149–177. <https://doi.org/10.1108/jpbafm-22-02-2010-b001>
- Sarjayadi, Frinaldi, A., Putri, N. E., & ASnil. (2024). Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2.
- Setiani, T., & Madila, R. N. (2019). Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintahan Kota Cimahi Periode 2009-2018. *Jurnal Akuntansi*, 12(2).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pub. L. UU 17/2003 (2003).
- Utami, N. A., & Martiningsih, Rr. S. P. (2024). Analysis of Regency and City Government Financial Reports in Provinsi Nusa Tenggara Barat. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, 3(3), 1113–1132. <https://doi.org/10.55927/eajmr.v3i3.8656>